

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manajemen mutu pembelajaran merupakan langkah awal untuk mewujudkan dan mempersiapkan sumberdaya manusia yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan pembelajaran yang mendasar pada manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Untuk meningkatkan mutu sekolah tersebut paling tidak melalui beberapa tahapan antara lain tahap sosialisasi, tahap penerapan manajemen berbasis sekolah dan manajemen berbasis masyarakat, serta tahapan penerapan manajemen peningkatan mutu yang berbasis sekolah.

Manajemen berbasis sekolah artinya semua kebijakan yang diambil oleh sekolah harus melibatkan guru, karyawan, siswa dan komite sekolah. Manajemen berbasis masyarakat artinya semua kebijakan sekolah harus melibatkan *stage holders* yang berasal dari masyarakat, sehingga masyarakat ikut bertanggungjawab terhadap perkembangan dan kemajuan sekolah tersebut. Manajemen mutu berbasis sekolah maksudnya semua kebijakan sekolah harus diambil melalui musyawarah yang melibatkan guru, siswa, karyawan dan komite sekolah yang berkaitan dengan kurikulum atau silabi dan proses pembelajaran siswa, dengan tujuan agar mendapatkan *out-put* siswa yang unggul. (Tilaar, 1998 : 245)

Bagi sekolah-sekolah yang berbentuk Madrasah baik dari tingkat Ibtidaiyah sampai pada tingkat Perguruan Tinggi, Pengembangan Mutu sekolah diarahkan untuk mencapai kompetensi dua bidang, yaitu Peningkatan Iman dan Taqwa (Imtaq ) dan Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). (Muhaimin, 2003 : 175)

Pendidikan Islam yang terdapat di madrasah sering ketinggalan dalam segala hal jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Penyebab perbedaan itu antara lain sumberdaya manusia (SDM) pada madrasah yang masih sangat memprihatinkan dan sistem pengelolaan pendidikan yang masih sangat kurang. Diperparah lagi masih adanya rasa sentimen yang berkembang di kalangan umat Islam itu sendiri sehingga menimbulkan kekacauan dari dalam. Misalnya pengangkatan pegawai kurang transparansi, penataan personil berdasar pilih kasih atau berdasarkan atau golongan. Untuk itulah maka kualitas pendidikan di lingkungan madrasah menjadi kurang baik.

Dibidang keagamaan, *out-put* madrasah kualitasnya jelas kalah dengan pondok pesantren. Keluaran dari pondok pesantren jauh lebih bagus dan mampu di jadikan sebagai kader ulama sedangkan keluaran dan madrasah kemampuannya masih dipertanyakan.

Adapun dibidang umum, *out-put* dari madrasah jelas kalah dengan sekolah-sekolah umum, karena sekolah-sekolah umum dalam proses *in-put* sangat memperhatikan tujuan sekolah dan peningkatan mutu pembelajaran

dalam menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Manajemen sekolah berbasis Masyarakat (MBM) dan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) sangat diperhatikan dan benar-benar telah dibuktikan adanya reformasi di bidang pendidikan. Berdasar kenyataan tersebut, pendidikan madrasah tertinggal jauh dengan sekolah-sekolah umum.

Pendapat lain mengatakan kegagalan pengelolaan madrasah itu disebabkan dua faktor, antara lain ; *Pertama*, setrategi pengembangan pendidikan Islam selama ini lebih bersifat *input oriented*. Setrategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bila mana semua *in-put* pendidikan telah dipenuhi maka Pendidikan akan lebih berkualitas untuk menjawab tantangan tersebut diatas, misalnya penyediaan buku-buku dan alat peraga lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan dapat menghasilkan *out-put* yang bermutu. Ternyata setrategi *input-output* yang diperkenalkan oleh teori education production function tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (madrasah), melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri. (Tilaar, 2000 : 20)

Kedua, Pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, yang diatur oleh jajaran birokrasi ditingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat makro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan

pembelajaran, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Untuk menjawab tantangan tersebut diatas madrasah harus dapat menghasilkan *out-put* yang mampu bersaing dengan sekolah-sekolah pada umumnya dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dan manajemen sekolah berbasis masyarakat.

Dengan memperhatikan seluruh apa yang ada dimasyarakat sekolah dan kekurangan yang ada baik, khususnya guru dalam mempersiapkan generasi yang akan datang, maka seorang pimpinan harus mengetahui kekurangan dalam segala hal, jangan cepat puas dalam memperoleh keberhasilan. Salah satu yang harus disikapi mengenai Manajemen Mutu Pembelajaran karena dengan memperhatikan hal tersebut satuan pendidikan akan dapat menilai diposisi manakah Madrasah kita ? Dengan demikian Pentingnya Mutu Pembelajaran sangatlah utama dalam proses pembelajaran, karena akan menyangkut masa depan Sekolah / Madrasah itu sendiri. Dalam proposal skripsi ini secara sederhana membahas mengenai pentingnya mutu pembelajaran, dengan harapan dapat membantu para pelaksana terutama pada Kepala Madrasah, Guru, Tenaga kependidikan, Komite madrasah, Dewan Pendidikan serta Tokoh masyarakat dalam meningkatkan dan mengefektifkan pembinaan dan pengembangan pendidikan di Madrasah, sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan zaman.

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah Wonosari, merupakan salah satu madrasah yang telah menerapkan Manajemen Mutu Pembelajaran sekolah yang berstandar nasional, sehingga MTs Muhammadiyah Wonosari memiliki keunggulan tersendiri jika dibanding dengan madrasah-madrasah swasta lainnya. Dengan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam penelitian ini judul yang diambil adalah "*Manajemen Mutu pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Wonosari Kabupaten Gunungkidul*". Yang di dalamnya akan menguraikan tentang implementasi manajemen peningkatan mutu sekolah yang dilakukan oleh MTs Muhammadiyah Wonosari.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen mutu pembelajaran yang dilakukan oleh Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Wonosari dalam menghadapi persaingan Manajemen mutu pembelajaran yang ada di kota Gunungkidul?
2. Bagaimana peran serta stakeholders dalam peningkatan Manajemen mutu

### **C. Tujuan Penelitian**

Setelah masalah dapat di rumuskan, maka langkah berikutnya adalah mengetahui tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana Manajemen mutu pembelajaran yang dikelola dan di kembangkan oleh Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Wonosari.
2. Untuk mengetahui peran serta stakeholders dalam peningkatan Manajemen mutu pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Wonosari.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Dapat membantu Kepala Sekolah MTs Muhammadiyah Wonosari, Gunungkidul dalam mengimplementasikan Manajemen Mutu Pembelajaran di Gunungkidul.
2. Dapat memberikan masukan kepada pengelola MTs Muhammadiyah Wonosari, Gunungkidul dalam mengimplementasikan Manajemen Mutu Pembelajaran di Gunungkidul.
3. Untuk melengkapi sebagi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## E. Telaah Pustaka

Untuk memudahkan sebuah penelitian dan menghasilkan penelitian yang akurat dan murni, tidak terjadi duplikasi dengan penelitian lain, maka penelusuran kajian pustaka perlu dilakukan oleh seorang peneliti agar hasil penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun bahan referensi untuk melengkapi penelitian ini diantaranya adalah buku karya Malik Fajar (2003), yang berjudul *Madrasah Dan Tantangan Modernitas*, buku ini didalamnya menguraikan tentang fenomena pendidikan Islam mulai dari pondok pesantren hingga madrasah dalam menghadapi percaturan dunia global. Oleh karena itu buku ini menjadi referensi dalam penelitian ini.

Buku yang kedua berjudul *Total Quality Management in Education* karya Edward Sallis (1996). Buku ini banyak menjelaskan tentang konsep-konsep dan langkah-langkah kongkrit di dalam mengembangkan Manajemen mutu pembelajaran di sekolah. Dari semua buku ini akan dijadikan pijakan dalam menyusun sebuah konsep tentang Manajemen mutu pembelajaran dan dijadikan sebagai landasan teori.

Untuk Penelitian yang diadakan para peneliti sebelumnya antara lain, penelitian saudari Nelvi Lucyana (2001), yang berjudul *Manajemen Mutu Pembelajaran di Pondok Pesantren Diniyah Muara Bungo Kabupaten Bungo Propinsi Jambi*. Isi dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pondok Pesantren Diniyah Muara Bungo Kabupaten Bungo Propinsi Jambi telah mengembangkan dan mengimplementasikan manajemen mutu pembelajaran

madrasah dengan melibatkan *stakeholders* dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Dalam penelitian ini, metodologi yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneliti lain adalah saudara Hasbi, yang berjudul Manajemen Mutu MAN Model Jogakarta dalam persepektif TQM tinjauan terhadap pelanggan eksternal. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penulis dalam penelitian ini mengambil judul *Manajemen Mutu Pembelajaran di MTs Muhammadiyah Wonosari Kabupaten Gunungkidul*. dalam penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang telah di lakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian ini akan menggambarkan penerapan manajemen mutu pembelajaran madrasah yang dilakukan oleh MTs Muhammadiyah Wonosari serta menjelaskan tentang peran serta stakeholders dalam peningkatan Manajemen mutu pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Wonosari. Metode yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana analisis serta hasil penelitian bukan bersifat angka-angka atau non nominal.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Mutu**

Pada abad industrialisasi merupakan babak baru bagi perkembangan dunia masa kini. Persaingan di dalam mencapai penguasaan pasar merupakan hal penting untuk mendapatkan kelangsungan sebuah perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, para pengelola perusahaan berusaha mengembangkan dengan berbagai macam



mereka dapat menemukan sebuah cara yang dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan mereka. Inilah yang dinamakan sebuah mutu atau kualitas baik berupa jasa maupun barang. (Slamet, 2000 : 21)

Sejak teori mutu berkembang di dunia usaha akhirnya merambah juga ke dunia pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan salah lembaga yang mengelola sumber daya manusia perlu dikelola dengan profesional dan sungguh-sungguh dalam rangka mencapai pengembangan manusia yang berkualitas, jika lembaga tersebut ingin mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Oleh karena itu secara logis di era sekarang adalah lembaga pendidikan yang memberikan servis atau pelayanan yang berkualitas atau bermutu terhadap pelanggannya, maka lembaga pendidikan tersebut otomatis akan mampu mengalahkan atau tidak kekurangan peserta didiknya bahkan melakukan seleksi dengan ketat agar bisa menerima peserta didik yang pilihan juga.

Untuk menjadikan lembaga pendidikan yang bermutu perlu diperhatikan dua hal yaitu; *pertama*, adalah faktor internal lembaga tersebut. *Kedua*, adalah faktor eksternal lembaga itu. (Tim Dikmenum, 1999)

Faktor internal adalah semua unsur atau komponen pendidikan yang meliputi manajemen pendidikan, sumber daya manusia, kurikulum, sarana prasarana, serta budaya yang dikembangkan oleh lembaga tersebut. Semua komponen pendidikan ini harus mampu melakukan sinergi dan

yang unggul. Semua ini tidak akan terwujud, jika tidak didukung oleh budaya yang dibangun secara khusus atau dengan konsep yang jelas dari pihak unsur pendidikan antara lain kepala sekolah, guru, karyawan siswa dan komite sekolah.

Apabila hal ini bisa dilakukan semua rencana kurikulum maupun metode pengembangan pengajaran akan dinamis sesuai dengan tuntutan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sumberdaya manusia yang unggul dan terampil serta mempunyai moralitas yang tinggi untuk mengembangkan Manajemen mutu pembelajaran sebagai tanggungjawab pendidik.

Di samping itu, untuk Manajemen pendidikan yang bermutu, diperlukan perencanaan yang visioner dari pengelola pendidikan, dan perencanaan tersebut dapat diaplikasikan dengan efektif dan efisien serta mudah untuk dipahami oleh berbagai pihak komponen pendidikan, serta mampu melakukan koreksi yang dapat meningkatkan pengembangan Manajemen mutu pembelajaran. Serta mampu mengambil kebijakan yang akomodatif untuk kepentingan kemajuan pembelajaran. (Arcaro, S. Jerome, 2005 : 40)

Faktor eksternal yaitu, peran masyarakat yang aktif dan dapat diterima oleh sekolah. Disini masyarakat sebagai pengguna lembaga pendidikan sebaiknya ikut aktif bersama para pengelola pembelajaran untuk merumuskan dan membantu pengembangan Manajemen mutu

sendiri untuk mempersiapkan sumberdaya manusia, belum tentu dapat dimanfaatkan oleh para pengguna jasa pendidikan. Sebab yang terjadi adalah lembaga pendidikan tidak mampu mengikuti perkembangan sosial masyarakat yang terus maju tanpa batas. Oleh karena itu, untuk membangun lembaga pendidikan yang bermutu, faktor eksternal atau stakeholder merupakan kunci penting untuk dipergunakan sebagai mitra dalam pengembangan kemajuan pendidikan dengan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi era sekarang keterlibatan masyarakat melalui stakeholder atau komite sekolah merupakan pemegang kebijakan penting dalam merumuskan konsep pengembangan Manajemen pembelajaran yang bermutu dan mampu mengikuti pembelajaran yang berdaya saing tinggi.

## **2. Manajemen Mutu Madrasah**

### **a. Madrasah sebagai sistem pendidikan Nasional**

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang keberadaannya tidak bisa lepas dari peran serta para alim Ulama atau intelektual muslim Indonesia terhadap perkembangan agama Islam. Mahmud Yunus menyatakan bahwa perkembangan pembelajaran Islam bisa dibagi kedalam awal perintisan, masa awal penjajahan dan pasca kemerdekaan. (Mahud Yunus, 1979 : 52)

Perjalanan madrasah hingga sampai saat ini menarik dikaji, karena madrasah merupakan lembaga pendidikan perpaduan antara

dianggap oleh masyarakat dianggap nomor dua dibanding dengan sekolah-sekolah yang lain, termasuk di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Di suatu sisi keberadaan madrasah masih tertutup untuk kalangan non muslim, madrasah pada saat ini terbatas sebagai penyelenggara pendidikan khusus bagi kaum muslimin. Maka madrasah lebih dikenal dengan sebutan sekolah umum yang berciri khas Islam. Jika dikaitkan dengan sebutan ini, nampaknya sebagian besar umat Islam bahkan lembaga pemerintah dalam hal ini Depag sebagai pengelola madrasah masih mempertahankan idiologinya dari pada kebutuhan praktis. Dengan demikian madrasah tetap akan mengalami kendala psikologis, apabila ada perubahan pengembangan madrasah yang mengindifikasikan sekuler.

Hal ini tampak pada pelajarannya pada tahun 1900-1908, yang diajarkan misalnya, Ilmu Nahwu, Ilmu Sharaf, Ilmu Fiqh, Ilmu Tafsir, Ilmu Tauhid, Ilmu Hadits, Ilmu Musthala ah Hadits, Ilmu Mantiq, Ilmu Ma'ani, Ilmu bayan, Ilmu Badi' Ilmu Ushul Fiqh. Kurikulum ini adalah pengajaran yang kembali dari sistem pendidikan Timur tengah pada masa abad pertengahan. Oleh karena itu, madrasah merupakan kopian dari sistem pendidikan klasik yang dibawa ke masa sekarang.

Menurut maksum disebutkan bahwa madrasah baru

Hal ini disebabkan oleh adanya para pelopor intelektual Islam Indonesia yang notaben lulusan dari Timur Tengah yang peduli terhadap nasib nagsa Indonesia itu sendiri. Ada ahli antropologio agama yang meneliti pendidikan Islam yaitu Karl Steenbrink mengidentifikasi bahwa ada empat faktor yang melatar belakangi perubahan Islam di Indonesia pada abad XX, antara lain :

1. Faktor keinginan untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadits.
2. Faktor semangat nasionalisme dalam melawan penjajah.
3. Faktor memperkuat basis gerakan sosial, ekonomi, budaya dan politik.
4. Faktor pembaharuan pembelajaran Islam di Indonesia.

Keempat faktor tersebut diatas, tidak serta merta mendorong pembaharuan pembelajaran Islam di Indonesia, melainkan bahwa gerakan pembaharuan yang terjadi di Indonesia menurut Karel mempunyai motif yang berbeda. (Karel A. Steenbrink, 1994 : 27-29)

Apapun yang dikatakan oleh Karel, yang jelas ada keinginan bagi para ulama atau intektual Muslim Indonesia untuk memperbaiki keadaan umat Islam di Indonesia yang masih belum memahami ajaran Islam secara benar. Oleh karena itu pendirian pendidikan atau madrasah merupakan salah satu hal pokok bagi pemahaman Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber ajaran Islam. Namun dalam

tetapi sudah berubah sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan agama Islam, namun juga pelajaran umum.

Sesuai dengan SKB tiga menteri, akibat dari Kepres no. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974, pemerintah mengambil kebijakan terhadap pengemabangan dan kebijakan kepada Madrasah. Yang pada gilirannya ketiga menteri tersebut adalah Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam negeri bersama-sama ikut tanggungjawab dalam pembinaan madrasah. Adapun isi dari Kepres No. 34 Tahun 1974 dan Impres adalah :

1. Pembinaan pendidikan Umum adalah tanggungjawab menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan Pendidikan Agama tanggungjawab Menteri Agama.
2. Untuk pelaksanaan Kepres No. 4 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974 dengan sebaik-baiknya perlu ada kerjasama antara departemen Dalam Negeri dan Departemen Agama.

Berdasarkan Kepres dan Inpres tersebut diatas, memberikan gambaran bahwa keberadaan madrasah sudah memiliki posisi yang sama dengan sekolah umum, walaupun harus menyesuaikan kurikulum yang diajarkan oleh sekolah umum dengan madrasah. Oleh karena itu, dalam menyusun kurikulum madrasah, disusun komposisi sekurang-kurangnya 30% mata pelajaran Agama dan 70% untuk mata

Bab I, pasal 1, ayat (2) dari SKB 3 Menteri dinyatakan bahwa tingkatan Madrasah meliputi :

1. Madrasah Ibtidaiyah, setingkat sekolah Dasar.
2. Madrasah tsanawiyah setingkat Sekolah Menengah Pertama.
3. Madrasah aliyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

Selanjutnya dari implikasi dari bab I tersebut diatas menimbulkan bab II (pasal 2) disebutkan ;

1. Ijasah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum yang setingkat.
2. Lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas.
3. Siswa Madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

Kalau dilihat dari sisi tersebut posisi madrasah masih di bawah dengan sekolah umum, sebab tidak ada bunyi yang mengatakan bahwa Sekolah Umum dapat melanjutkan ke Madrasah, namun demikian walaupun tidak dinyatakan secara otomatis madrasah di bawah pembinaan sekolah umum. Di satu pihak juga memberikan eksistensi yang kuat secara hukum bahwa madrasah sudah terintegrasi dengan sistem pendidikan Nasional yang pengelolaannya tanggungjawab pemerintah. Walaupun ada kesan bahwa setiap departemen mempunyai lembaga pendidikan sendiri-sendiri yang dibawah payun pendidikan nasional. Maka, yang terjadi adalah perebutan anggaran







pendidikan , lebih dulu ditinjau dari sisi etimologi tentang pendidikan. Ia berasal dari kata "*didik*" yang mempunyai arti pengasuh anak, membimbing kearah yang lebih baik, memajukan mental, perkembangan moral ataupun keindahan fisik. (Muri Yusuf, 1986 : 23)

Oleh karena itu, pendidikan merupakan proses penyampaian pengetahuan pengetahuan untuk mengembangkan manusia seutuhnya, yang memiliki keyakinan, sikap dan ketrampilan guna mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya. Di dalamnya mencakup tiga aspek: (a) Proses penyampaian, (b) pengetahuan dan meteri, dan (c) manusia seutuhnya. (Zamroni, 1977 : 28)

Menurut Ki Hajar Dewantara pembelajaran adalah tuntutan di dalam hidup tumbuh kembang anak-anak, pembelajaran yang diinginkan oleh ia adalah menuntun segala kekuatan dan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya. (Suwarno, 1985 : 2)

Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh Imam Barnadib bahwa pendidik adalah segala perbuatan yang etis, kreatif, sistematis dan intensional, dibantu oleh metode dan teknik

Sementara Undang-Undang No. 20 tahun 2003: dinyatakan pembelajaran adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Undang-Undang No.20, 2003 : 9)

Sejalan dengan ini Johannes Muller mengartikan pembelajaran secara lebih luas, yakni segala upaya masyarakat serta hasil-hasilnya yang bertujuan meneruskan dan menyediakan pengetahuan dan ketrampilan, sikap dan tingkah laku, yang perlu demi kelangsungan ataupun perubaha masyarakat, dengan menawarkan kesempatan yang sebaik mungkin kepada semua orang demi perkembangan manusia seutuhnya. (Dindhunata, 2001 : 15)

Jadi pengertian pembelajaran adalah meliputi pembelajaran informal (keluarga, tempat kerja, agama), pembelajaran formal di sekolah (termasuk perguruan tinggi), pembelajaran luar sekolah yang dilembagakan (pendidikan orang dewasa), media masa (sebagai guru tersamar), dan segala kebijakan

Oleh karena itu pendidikan mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai penjaga nilai-nilai budaya dan pengembangan potensi peserta didik. Atau dengan kata lain pembelajaran pada dasarnya adalah pengalihan kebudayaan (*cultural transmission*) dari masa ke masa yang lain dan pengembangan manusia (*human development*) maka selain memperhatikan manusia sebagai objek dan subjek, pembelajaran juga perlu memperhatikan masukan-masukan (*ekternal inputs*) yang sangat luas cakupannya. (Imam Barnadib, 2002 : 1)

Dengan demikian pembelajaran merupakan proses budaya dan pembudayaan manusia yang berlangsung secara integral dan total dalam seluruh aspek kehidupan manusia itu sendiri. Proses budaya dan pembudayaan ini berlangsung sepanjang hayat manusia. Sebagai proses budaya, pendidikan merupakan pewaris seluruh khazanah ilmu pengetahuan dan harta kebudayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini terjadi secara berkesinambungan sebagaimana ditunjukkan oleh makna dan pengertian kata pewarisan yang terkandung di dalamnya. Semakin baik mutu dan kualitas proses pewarisan tadi, semakin baik pula ilmu pengetahuan dan harta kebudayaan yang diwariskan oleh suatu generasi ke generasi selanjutnya.

## 2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran selalu dikaitkan dengan tujuan hidup manusia itu sendiri, padahal tujuan manusia itu sangat kompleks, oleh karena itu tujuan pembelajaran tidak bisa lepas dari kepentingan ideologi tertentu dalam proses pembelajaran. Gagasan-gagasan tentang pembelajaran yang pada saat ini adalah berupa barang jadi siap pakai sebenarnya hasil dari olahan bahan baku sepanjang sejarah. Barang kali saja kelak barang jadi zaman kita ini akan menjadi bahan mentah pada proses yang akan datang. Hal ini seperti yang dikatakan oleh H.L. Mencken bahwa pendidikan adalah salah satu wilayah di mana “selalu diadakan penyelesaian yang jitu, rapi, sederhana, dan selalu keliru”.

Sedangkan Jhon Dewey memberika tiga kriteria tentang tujuan yang baik diantaranya adalah:

- a. Tujuan yang sudah ada haruslah menciptakan perkembangan yang lebih baik daripada kondisi-kondisi yang sudah ada sebelumnya. Hak tersebut didasarkan pada pemikiran yang telah berjalan atas sumber-sumber dan kesulitan-kesulitan yang ada.
- b. Suatu tujuan itu harus fleksibel atau lentur yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Suatu tujuan akhir yang dibuat diluar proses kegiatan mempunyai hubungan kerja

c. Tujuan itu harus mewakili kebebasan aktivitas. Maksudnya adalah istilah tujuan itu ada dalam bayangan ide (sedang dipikirkan), oleh karena itu satu-satunya cara yang mana kita dapat menentukan sasaran-sasaran tujuan di depan kita akan berakhir. (H.M. Djumberansyah Indar, 1994 : 89-90)

Oleh karena itu, pembelajaran sebaiknya dipikirkan sehati-hati mungkin, meski tak terelakkan selalu ada yang luput dan kapiran sebagaimana layaknya fitrah hasil kebijakan manusia. Untuk itu perlu kiranya mengurai dan merenungkan kembali ideologi pembelajaran dalam rangka menemukan konsep pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan jaman, dan bisa membentuk paradigma pembelajaran yang bisa membangun manusia seutuhnya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pendidikan Nasional Indonesia.

Tujuan pendidikan merupakan masalah inti dalam pembelajaran, sebab menentukan arah segala usaha yang akan dijalankan terhadap pembentukan diri peserta didik. Tanpa tujuan yang jelas, proses pembelajaran tidak akan mengarah yang baik. Hal ini seperti dikatakan oleh Sutari Imam Barnadib dalam bukunya yang berjudul "Pendidikan Sistematis" menyebutkan bahwa:

Pendidikan akan mempunyai tujuan bila pendidik sendiri mempunyai tujuan di dalam hidupnya. Makin kurang kadar tujuan pendidikan atau makin kurang sempurna pengetahuannya tentang tujuan pendidikan tersebut,

Pembelajaran di Indonesia adalah bertujuan mempersiapkan manusia Indonesia menuju masyarakat madani yang diridloi Tuhan . Yaitu manusia yang memiliki sikap dan wawasan keimanan dan akhlak tinggi, kreatif, mandiri, toleransi, kerja keras, serta menjunjung harkat dan martabat manusia. Inilah yang semestinya tujuan dari segala aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran selalu dikaitkan dengan unsur filsafat dan budayanya suatu bangsa yang dominan.

Hal ini nampak pada rumusan dari Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah:

Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Begitu juga Undang-Undang No. 20 tahun 1989 BabII pasal 4 yang lalu juga dikatakan sebagai berikut:

Pendidikan nasional bertujuan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Melihat dari rumusan di atas, nampak bahwa bangsa

menjadi warga negara yang baik, begitu juga tidak ketinggalan dengan dunia perkembangan global. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan di Indonesia adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu dan berteknologi serta mampu berkiprah di dunia global.

Hal ini merupakan garapan dari tujuan pembelajaran yang mempunyai basis agama, yaitu: salah satunya pendidikan madrasah.

### **3. Tujuan Pembelajaran Madrasah Tsanawiyah**

Madrasah kalau dilihat dari bahasa berasal dari bahasa arab, yang dalam makna bahasa Indonesia setara dengan sekolah, yang mana kata sekolah bukan diambil dari bahasa asli Indonesia melainkan diambil dari bahasa asing, misalnya *school* ataupun *scola*. Namun kata istilah madrasah identik dengan sekolah agama, setelah mengarungi perjalanan peradapan bangsa madrasah mengalami berbagai perubahan-perubahan walaupun tidak melepaskan diri dari makna asal sesuai dengan ikatan budayanya yakni, budaya Islam.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, tentu tujuan disesuaikan dengan pembelajaran Islam. Tujuan pembelajaran Islam adalah seperti yang dirumuskan oleh Omar Muhammad al-Toumy al-Syibani salah seorang ahli pendidikan



landasan dasar untuk mencapai tujuan utama cita-cita Islam, maka pembelajaran harus mampu melahirkan kekuatan tiga dimensi yang saling berkait dengan yang lainnya:

- a. Dimensi Imanitas yang dapat mendudukan harkat dan martabat manusia sebagai hamba Allah yang tertinggi di dunia serta punya daya tahan terhadap ujian hidup dan berpijak pada kebenaran.
- b. Dimensi jiwa dan pandangan hidup Islam yang membawa cita *rahmatan lilalamin*.
- c. Dimensi kemajuan yang akan memanjatkan manusia tangguh terhadap apa yang dititahkan oleh Alloh dan terhadap segala kejadian suatu perbuatan yang ada. (Khoiron Rosyadi, 2004 : 161)

Oleh karena itu menurut dia tujuan pembelajaran yang paling sederhana adalah perbuatan yang diusahakan oleh proses pendidikan dalam mengembangkan tingkah laku individu, dalam kehidupan pribadinya, masyarakat dan hubungan dengan alam sekitarnya. Atau dengan kata lain tujuan pembelajaran Islam adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat. (Omar Muhammad al-Toumy al-Syabani, 1979 : 399)

Al Abrasyi dengan tegas mengataka bahwa tujuan pokok dari pembelajaran Islam adalah mendidik budi pekerti dan

dikutip oleh Hasan Langgulung tujuan pembelajaran Islam adalah tercapainya kesempurnaan manusia melalui pendekatan spiritual dengan melakukan berbagai aktivitas ibadah. ( Hasan Langgulung, 1988 : 307)

Berdasarkan berbagai pendapat ahli pembelajaran Islam umumnya masih nampak pada tataran idialitas makna manusia yang kadang sulit untuk diwujudkan, sebab konsep yang dikembangkan oleh para ahli adalah tujuan akhir yang tidak pernah selesai tetapi sebuah proses manusia itu sendiri dalam mengenal Tuhannya. Oleh karena itu madrasah tidak luput dari konsep seperti ini, yaitu ingin membentuk manusia yang ideal yang diinginkan oleh Islam.

Namun lembaga madrasah sebagai bagian sistem pendidikan nasional Indonesia, juga tidak bisa lepas dari tujuan pembentukan manusia Indonesia yang telah dicantumkan pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 seperti yang telah disebutkan di atas. Walaupun awalnya madrasah dulunya didirikan bertujuan untuk menjaga manusia mengerti agamanya agar tidak terlempar ke api neraka. Hal ini didasarkan kepada ayat Al-Qur'an surat Al-Tahrim ayat: 6, yang berbunyi” *Hai orang-orang yang beriman*

Ayat tersebut yang dijadikan landasan pendidikan Islam, agar umat Islam untuk mendidik dirinya dan keluarganya serta umat secara keseluruhan agar tidak masuk api neraka. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari pembelajaran madrasah adalah membentuk dan mengembangkan keimanan serta menjadikan kholifah di bumi sebagai manusia yang kreatif, inovatif yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk kesejahteraan umat manusia sebagai kodratnya menjadi kholifah di bumi.

Begitu juga Madrasah Tsanawiyah, sebagai lembaga pendidikan Islam yang dalam sistem pembelajaran formal berada pada tingkat menengah pertama atau setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama. Tujuan di selenggarakan pembelajaran Madrasah Tsanawiyah adalah memberikan penanaman nilai-nilai akhidah Islamiah yang mantap bagi para siswa yang menempuh di Madrasah Tsanawiyah. Pendidikan di tingkat Tsanawiyah usia siswanya dari segi psikologi adalah usia pancaroba yaitu berbagai macam goncangan akan menerpa pada dirinya, oleh karena itu salah satu tujuan pembelajaran adalah menanamkan keimanan akhidah

### c. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

#### 1. Pengertian

Pengertian tentang Manajemen mutu merupakan sesuatu yang semu, sebab Manajemen mutu dalam pengertian seseorang sangat subyektif. Namun ada yang mengartikan bahwa Manajemen mutu adalah kesesuaian terhadap spesifikasi atau kesesuaian terhadap standart. Pengertian ini adalah mengandung pemahaman yang statis, padahal Manajemen mutu adalah sasaran yang bergerak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelanggan.

Dalam konteks pembelajaran, Manajemen mutu dikaitkan dengan efektifitas suatu lembaga. Oleh karena itu, Manajemen mutu dalam pembelajaran mencakup input, proses, output pendidikan. Madrasah yang unggul tentu madrasah dengan pengelolaan yang mengedepankan Manajemen mutu di segala bidang. Ada dua faktor yang menjelaskan mengapa upaya perbaikan Manajemen mutu pembelajaran selama ini kurang atau tidak berhasil. *Pertama* strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented*.

Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bila mana suatu input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga

.....

(baca: madrasah) akan dapat menghasilkan *output* (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran biokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat/ wilayah) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (madrasah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya secara utuh dan akurat oleh biokrasi pusat.

Konsep Manajemen mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/ upaya) baik berupa barang atau jasa : baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Dalam konteks pendidikan pengertian Manajemen mutu, dalam hal ini mengacu pada *proses pendidikan dan hasil pendidikan*. Dalam “proses pendidikan” yang bermutu terlibat berbagai *input*, seperti: bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metode (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumberdaya lainnya serta menciptakan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi dimensi sinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas: baik konteks kurikulum maupun ekstra-

yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. Manajemen Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, Ebta atau Ebtanas). Atau juga prestasi di bidang lain. Misalnya prestasi disuatu cabang olah raga, seni atau ketrampilan tambahan tertentu, contoh ketrampilan komputer atau teknik lainnya. Bahkan prestasi madrasah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, keberhasilan.

Walaupun demikian, agar Manajemen mutu tetap terjaga dan agar proses peningkatan Manajemen mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan Manajemen mutu tersebut. Menurut Sallis ada banyak potensi

- f. Dukungan orang tua, dunia usaha, masyarakat lokal.
- g. Sumber-sumber yang tersedia.
- h. Penggunaan teknologi mutakhir.
- i. Kepemimpinan yang kuat, dan memiliki tujuan yang jelas.
- j. Kepedulian dan perhatian pada siswa.
- k. Beberapa kombinasi dari faktor-faktor tersebut.

Pemikiran ini telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan Manajemen mutu pembelajaran harus berbasis sekolah atau madrasah sebagai institusi paling depan dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini, kemudian dikenal dengan manajemen peningkatan mutu pembelajaran berbasis sekolah (*School Based Quality Management*) atau dalam nuansa yang lebih bersifat pembangunan disebut *School based Quality Improvement*. Konsep yang menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggungjawabnya masing-masing ini berkembang berdasarkan kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pembelajaran melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada. Sekolah harus mampu menerjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pembelajaran serta memahami kondisi lingkungan sekolah kemudian melalui proses perencanaan sekolah harus





individu sekolah sebagai evaluasi diri dan dimanfaatkan untuk memperbaiki target mutu dan proses pembelajaran tahun berikutnya. Dalam hal ini, RABS harus merupakan penjabaran dari target mutu yang ingin dicapai dan skenario sebagaimana mencapainya.

## **2. Makna Manajemen Mutu Pendidikan**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana sebagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut.

Madrasah yang bermutu dan berkualitas merupakan langkah awal untuk bersaing di era global ini. Untuk itu, perlu

Pengembangan madrasah yang berbasis Manajemen mutu adalah segala usaha yang terus menerus melalui manajemen diberbagai komponen pembelajaran, baik dari manajemen perencanaan madrasah, manajemen sumberdaya manusia, manajemen kurikulum atau pengajaran dan manajemen keuangan, serta manajemen evaluasi, serta manajemen pengembangan. Oleh karena itu, berhasil tidaknya madrasah menjadi unggulan dalam segala hal, sangat ditentukan oleh manajemen Mutu pengelolaannya.

Untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia, pembelajaran memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pemberdayaan pembelajaran yang lebih berkualitas. Usaha tersebut diantaranya adalah melalui pengembangan dan perbaikan diberbagai komponen pembelajaran yaitu: kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi

Di samping itu mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pembelajaran formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/ Manajemen mutu pembelajaran. Hal ini akan bisa dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu, diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya. Walaupun demikian, agar manajemen mutu tetap terjaga dan agar proses peningkatan manajemen mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut (adanya *benchmarking*). Pemikiran ini telah mendorong munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan manajemen mutu pembelajaran di masa yang akan datang harus berbasis sekolah sebagai institusi pablig depan dalam kegiatan pendidikan. Pendekatan ini, kemudian dikenal dengan manajemen peningkatan mutu pembelajaran berbasis sekolah (*School Based Quality Management*) atau dalam nuansa yang bersifat pembangunan (*developmental*) disebut *School Based Quality Improvement*.

Tujuan dari pengembangan manajemen pembelajaran yang berbasis mutu adalah:

- a. Mensosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah khususnya kepada masyarakat.
- b. Memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat diimpletasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman kultural, sosio-ekonomi masyarakat dan kompleksitas geografisnya.
- c. Menambah wawasan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat sekolah dan individu yang peduli terhadap pembelajaran, khususnya peningkatan Manajemen mutu pembelajaran.
- d. Memotivasi masyarakat sekolah untuk terlibat dan berpikir mengenai peningkatan Manajemen mutu pembelajaran/ pada sekolah masing-masing.
- e. Menggalang kesadaran masyarakat sekolah untuk ikut serta secara aktif dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan Manajemen mutu pembelajaran.
- f. Memotivasi timbulnya pemikiran-pemikiran baru dalam mensukseskan pembangunan pendidikan dari individu dan masyarakat sekolah yang di garis paling depan dalam proses pembangunan tersebut.

- g. Menggalang kesadaran bahwa peningkatan Manajemen mutu pembelajaran merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, dengan fokus peningkatan Manajemen mutu yang berkelanjutan (terus menerus) pada tataran sekolah.
- h. Mempertajam wawasan bahwa Manajemen mutu pembelajaran pada tiap sekolah harus dirumuskan dengan jelas dan dengan target Manajemen mutu yang harus dicapai setiap tahun, sampai 5 tahun, sehingga tercapai misi sekolah terdepan.

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah/ madrasah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pembelajaran yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah atau madrasah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori *efektive school* yang lebih memfokuskan diri pada perbaikan proses pembelajaran. Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen mutu ini antara lain sebagai berikut:

1. Lingkungan sekolah/ madrasah yang aman dan tertib.
2. Sekolah/ madrasah memiliki misi dan target manajemen mutu yang ingin dicapai.
3. Sekolah/ madrasah memiliki kepemimpinan yang kuat.
4. Adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah (kepala

5. Adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK.
6. Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/ perbaikan Manajemen mutu.
7. Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid dan masyarakat.

Pengembangan konsep manajemen mutu ini didesain untuk meningkatkan kemampuan sekolah dan masyarakat dalam mengelola perubahan pendidikan kaitannya dengan tujuan keseluruhan, kebijakan, strategi perencanaan, inisiatif kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah dan otoritas pembelajaran.

Pendidikan ini menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah laku seluruh komponen sekolah dalam memandang, memahami, membantu sekaligus sebagai pemantau yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sekolah yang bersangkutan dengan didukung oleh pengelolaan sistem informasi yang presentatif dan valid. Akhir dari semua itu ditujukan kepada keberhasilan sekolah untuk menyiapkan pendidikan yang berkualitas/ bermutu bagi masyarakat.

Kepala sekolah/ madrasah harus tampil sebagai koordinator dari sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok



hal yang bermanfaat bagi peningkatan manajemen mutu khususnya. Sementara itu, kebijakan makro yang dirumuskan oleh pemerintah atau otoritas pendidikan lainnya masih diperlukan dalam rangka menjamin tujuan-tujuan yang bersifat nasional dan akuntabilitas yang berlingkup nasional dan lokal. Oleh sebab itu, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berjalan sinergi di dalam membuat kebijakan pendidikan.

Dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini diharapkan sekolah dapat bekerja dalam koridor-koridor tertentu antara lain: *Pertama* adalah dari segi sumber daya, artinya sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat.. Selain pembiayaan operasional/ administrasi, pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk orientasi memperkuat sekolah dalam menentukan dan mengalokasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan Manajemen mutu, pemisahan biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya, dan pengurangan kebutuhan biokrasi pusat. *Kedua* adanya pertanggung jawaban (*accountability*); sekolah dituntut untuk memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan antara komitmen terhadap standar keberhasilan dan harapan/ tuntunan orang tua/ masyarakat.



meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. Untuk itu setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggung-jawaban dan mengkomunikasikannya kepada orang tua/ masyarakat dan pemerintah, dan melaksanakan kaji ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan program prioritas sekolah dalam proses peningkatan manajemen mutu. *Ketiga* adanya penerapan kurikulum: berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi (content) dan proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada manfaat dan relevansinya terhadap siswa, sekolah harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan semua indera dan lapisan otak serta menciptakan tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan, memiliki sikap arif dan bijaksana, karakter dan memiliki kematangan emosional.

Dengan demikian ada tiga hal yang perlu diperhatikan

.....

1. Pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan siswa
2. Bagaimana mengembangkan ketrampilan pengelolaan untuk menyajikan kurikulum tersebut kepada siswa sedapat mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada.
3. Mengembangkan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah.

Untuk melihat proses pencapaian kurikulum, siswa, harus dinilai melalui proses tes yang dibuat sesuai dengan standat nasional dan mencakup berbagai aspek koqnitif, affektif, dan psikomotor maupun aspek psikologi lainnya. Proses ini akan memberikan masukan ulang secara obyektif kepada orang tua mengenai anak mereka (siswa) dan kepala sekolah yang bersangkutan maupun sekolah lainnya mengenai performan sekolah sehubungan dengan proses peningkatan mutu pembelajaran.

Oleh karena itu, madrasah atau sekolah bertanggung jawab dan terlibat dalam proses rekrutmen (dalam arti penentuan jenis guru yang diperlukan) dan pembinaan struktural (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan staf lainnya). Sementara itu pembinaan profesional dalam rangka pembangunan kapasitas/kemampuan kepala sekolah dan pembinaan ketrampilan guru

lainnya dilakukan secara terus menerus atas inisiatif sekolah. Untuk itu biokrasi di luar sekolah berperan untuk menyediakan wadah dan instrumen pendukung. Dalam konteks ini pengembangan profesional harus menunjang peningkatan manajemen mutu dan penghargaan terhadap prestasi perlu dikembangkan. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengontrol sumber daya manusia, fleksibilitas dalam merespon kebutuhan masyarakat, misalnya: pengangkatan tenaga honorer untuk ketrampilan yang khas, ataupun lokal. Kondisi ini telah membawa kepada suatu kesadaran bahwa hanya sekolah yang dikelola secara efektif (dengan manajemen yang berbasis sekolah) yang akan mampu merespon aspirasi masyarakat secara tepat dan cepat dalam hal manajemen mutu pembelajaran. Konsep ini sebenarnya lebih memfokuskan diri kepada tanggung jawab individu sekolah dan masyarakat pendukungnya untuk merancang manajemen mutu yang diinginkan, dan mengevaluasi hasilnya, dan secara terus menerus menyempurnakan dirinya. Semua upaya dalam pengimplementasian manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini harus berakhir kepada peningkatan mutu siswa.

Sementara itu pendanaan walaupun dianggap penting dalam perspektif proses perencanaan dimana tujuan ditentukan, kebutuhan diidentifikasi, kebijakan diformulasikan dan prioritas

ditentukan, serta sumber daya dialokasikan, tetapi fokus perubahan kepada bentuk pengelolaan yang mengekspresikan diri secara benar kepada tujuan akhir yaitu mutu pembelajaran dimana berbagai kebutuhan siswa untuk belajar terpenuhi. Untuk itu dengan memperhatikan kondisi geografik dan sosio-ekonomi masyarakat, maka sumber daya dialokasikan dan didistribusikan kepada sekolah dan pemanfaatnya dipercayakan kepada sekolah sesuai dengan perencanaan dan prioritas yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut dan dengan dukungan masyarakat. Pedoman pelaksanaan peningkatan manajemen mutu walaupun ada hanya bersifat umum yang memberikan rambu-rambu mengenai apa-apa yang boleh/ tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu sekolah-sekolah harus berjuang untuk menjadi pusat mutu (center for excellence) dan ini mendorong masing-masing sekolah agar dapat menentukan visi dan misinya untuk mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan masa depan siswanya.

### **G. Metodologi Penelitian**

Metode berasal dari bahasa Yunani "Metodos" yang artinya jalan atau cara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan "Metode" adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Departemen P dan K, 1995 : 652) Metodologi yang dipergunakan

## 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah menggunakan deskriptif kualitatif, seperti yang diungkapkan oleh Moelong bahwa penelitian jenis kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengembangkan dan memahami sesuatu yang dikaji secara utuh. (Moelong, 2001 : 3) Dengan jenis penelitian kualitatif ini dapat mendapatkan data-data yang akurat sebagai sarana untuk menjelaskan tentang paradigma penelitian di atas. Yaitu tentang manajemen mutu pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Wonosari.

Dengan demikian penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan secara deskriptif bagaimana pola manajemen mutu pembelajaran, serta peran stakeholder dalam peningkatan manajemen mutu pembelajaran, serta kendala apa yang dihadapi oleh MTs Muhammadiyah Wonosari dalam peningkatan manajemen mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh MTs Muhammadiyah Wonosari Gunungkidul.

## 2. Subyek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian adalah tempat memperoleh keterangan atau sumber data. Oleh karena yang akan dijadikan subyek penelitian disini adalah Kepala Madrasah, Guru, Siswa, dan komite sekolah. Adapun obyek penelitian disini adalah Manajemen mutu sekolah yang dilakukan oleh Lembaga Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Wonosari Gunungkidul.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data. Teknik tersebut antara lain wawancara (interview), Pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan diuraikan satu persatu.

a. Teknik Wawancara (interview), teknik wawancara itu ada tiga macam, yaitu:

- 1). Interview tak terpimpin, yaitu tanya jawab antara interviewer dengan interviewee tanpa dikendalikan dengan pedoman pertanyaan.
- 2). Interview terpimpin, yaitu tanya jawab antara interviewer dengan interviewee dikendalikan dengan pedoman pertanyaan.
- 3). Interview bebas terpimpin, yaitu wawancara gabungan antara metode interview terpimpin dengan interview tak terpimpin.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik interview bebas dan terpimpin, yaitu interviewee bebas mewawancarai responden baik menggunakan pedoman pertanyaan maupun tidak. Tujuannya adalah agar mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya.

b. Teknik Observasi

Teknik observasi atau pengamatan adalah suatu cara untuk mengumpulkan data melalui pengamatan baik langsung maupun tidak

1. Observasi adalah pengamatan yang sistematis tentang

fenomena yang diselidiki (Masri Singarimbun, 1992 : 136). Jenis teknik observasi itu terdiri dari :

- 1). Observasi partisipan dan non partisipan, partisipan artinya peneliti ikut berperan aktif dalam aktifitas kehidupan yang diteliti. Sedangkan non partisipan yaitu peneliti tidak ikut aktif dalam satu kehidupan dengan yang diteliti.
- 2). Observasi sistemik, yaitu pengamatan yang memuat faktor-faktor tertentu yang diatur dan dikategorisasikan terlebih dahulu.
- 3). Observasi eksperimen, yaitu pengamatan yang dikendalikan dengan prosedur dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik observasi non partisipan dan teknik observasi sistemik. Tujuannya adalah agar dalam mencari dan mengumpulkan data tersebut lebih fleksibel dan tidak terlalu memanipulasi data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak subyektif.

- c. Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis, misalnya buku harian, catatan pribadi, laporan, formulirisasi, anggaran dasar/ anggaran rumah tangga, surat keputusan, buku juklak juknis, data dinding dan lain sebagainya<sup>1</sup>. Teknik dokumentasi ini, cocok untuk digunakan dalam penelitian ini, karena sesuai dengan sifat dan jenis penelitian yang disajikan yaitu tentang Manajemen Mutu Pembelajaran di MTs Muhammadiyah Wonosari Gunungkidul.

#### 4. Metode Analisa Data

Setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah menganalisa data tersebut. Metode analisa datanya dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik penyimpulan deduktif dan induktif atau campuran. Setelah data-data terkumpul setiap aitem ditafsirkan, diinterpretasikan serta dimaknai sesuai dengan reori-teori yang menunjang. Dengan langkah-langkah ini dapat ditarik kesimpulan yang tepat sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, maka akan dibuat sistematika pembahasan yang meliputi; pendahuluan, isi dan penutup.

Pada Bab I, adalah pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Pembahasan berikutnya adalah Bab II, hasil penelitian tentang manajemen Mutu Pembelajaran madrasah, antara lain meliputi madrasah sebagai sistem pendidikan nasional, tujuan pendidikan madrasah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan Manajemen Berbasis Peningkatan Mutu Sekolah

MANAJEMEN BERBASIS MUTU DALAM KEBERHASILAN MADRASAH DALAM MELAKUKAKAN KEMERDEKAAN



Adapun Bab III, membicarakan tentang Gambaran Umum Mts Muhammadiyah Wonosari, yang berisi tentang, Lokasi MTS Muhammadiyah Wonosari, Setruktur Organisasi, Visi dan Misi , Guru dan Siswa, Fasilitas Sarana dan Prasarana, dan Lingkungan MTS Muhammadiyah Wonosari .

Berikutnya Bab IV, Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Demikianlah sistematika yang dapat disajikan dalam kerangka penelitian yang berjudul manajemen mutu pendidikan di Madrasah Muhammadiyah Wonosari Gunungkidul